

Demokrasi, Politik Identitas, dan Kohesi Sosial: Peluang dan Tantangan Strategi Dakwah untuk Menghalau Provokasi Politik di Indonesia

Democracy, Identity Politics, and Social Cohesion: Opportunities and Threats of Dakwah Strategy in Countering Political Provocation in Indonesia

Husni Mubarok

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Jakarta

email: aceng.husni2@gmail.com

Abstract : This paper intends to discuss the latest problems in Indonesia due to identity politics, its potential solutions, and implications for preachers (and religious leaders in general) to reconcile the cracked social relations in Indonesia. Indonesia is recognized as one of the succeed transitional countries in the world. Even so, democracy in a pluralistic country like Indonesia is always potentially prone to conflict because of identity politics for, instead of uniting it is divided society. In current time, more people became more sensitive and easily provoked. How to understand this phenomenon? What solutions can be made to overcome them? This paper argues that democracy is the best political system owned by the Indonesian people. While recognizing that democracy inherently allows identity politics, this paper argues that identity politics must be managed in such a way as to strengthen the resilience of the people from the onslaught of provocation. This paper proposes social cohesion as a solution. Social cohesion contains four elements: structural involvement, involvement of associations, involvement of day-to-day activities, and symbolic or cultural involvement.

Abstraksi: Tulisan ini hendak mendiskusikan berbagai persoalan mutakhir di Indonesia akibat politik identitas, jalan keluarnya, dan hal-hal yang mungkin dilakukan para mubaligh (dan tokoh agama pada umumnya) untuk merekatkan kembali hubungan sosial di masyarakat yang tengah retak. Demokrasi di Indonesia diakui sebagai satu dari sedikit negara yang mengalami transisi dan berhasil. Meski demikian, demokrasi di negara

plural seperti Indonesia selalu berpotensi rawan konflik sebab politik identitas yang, alih-alih mempersatukan, ia malah memecah belah masyarakat. Belakangan situasinya berubah yang mana masyarakat semakin sensitif dan mudah terprovokasi. Bagaimana memahami fenomena ini? Apa jalan keluar yang bisa diajukan untuk mengatasinya? Tulisan ini berargumen bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Seraya mengakui demokrasi secara inheren memungkinkan politik identitas, tulisan ini berpendapat bahwa politik identitas harus dikelola sedemikian rupa dengan salah satunya memperkuat daya tahan masyarakat dari gempuran provokasi. Tulisan ini mengusulkan kohesi sosial sebagai jalan keluarnya. Kohesi sosial tersebut mengandung empat unsur: Keterlibatan struktural, keterlibatan asosiasi, keterlibatan kegiatan sehari-hari, dan keterlibatan simbolik atau kebudayaan.

Keywords: *democracy, identity politics, social cohesion, structural engagement, associational engagement, quotidian engagement, symbolic/cultural engagement.*

A. Pendahuluan

Tulisan ini hendak mendiskusikan berbagai persoalan mutakhir di Indonesia akibat politik identitas, jalan keluarnya, dan hal-hal yang mungkin dilakukan para *mubaligh* (dan tokoh agama pada umumnya) untuk merekatkan kembali hubungan sosial di masyarakat yang tengah retak. Kita tahu, dua dekade silam Indonesia berganti rezim dari Orde Baru yang otoriter ke Orde Reformasi yang demokratis. Sebagai negara demokratis, pemerintah Indonesia berkomitmen memberi jaminan kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berpolitik. Di era demokratis ini, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih di semua level pemerintahan. Lebih dari itu, Indonesia meratifikasi kovenan internasional tentang hak sipil politik sebagai wujud komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia. Atas dasar ratifikasi dan perangkat hukum lainnya, aparat keamanan tidak bisa lagi sewenang-wenang terhadap warga negara, termasuk dalam menangani persoalan sosial di masyarakat. Singkatnya, sistem demokrasi telah memberi kesempatan kepada warga negara lebih leluasa, betapapun

penduduk Indonesia beragam dari sisi suku, bahasa, etnis, dan agama, yang seringkali memicu konflik dan ketegangan di masyarakat.

Demokrasi di tengah masyarakat yang plural tidak selalu mulus. Kita menghadapi berbagai persoalan. *Pertama*, pesta demokrasi seperti pemilihan kepala negara dan kepala daerah langsung turut mendorong politik identitas. Politik identitas yang dimaksud adalah politisi yang mengedepankan identitas seperti suku, ras, agama, dan identitas kedaerahan untuk meraih suara terbanyak ketimbang program kerja yang paling baik untuk kepentingan masyarakat atau politik yang berorientasi kerja. Sementara itu, akibat politik identitas yang membuat masyarakat terpecah, mereka tidak lagi peduli bagaimana mengembalikan agar masyarakat bersatu kembali sebagai bangsa yang berbeda tetap satu tujuan (*bhineka tunggal ika*). Bukan tidak mungkin, mereka jadi mudah tersinggung, gampang terbakar emosi, dan rentan terprovokasi. Jika terjadi perselisihan, apalagi sampai terjadi insiden kekerasan, maka pendidik, mubaligh, ustad, guru, kiai, dan tokoh agama lainnya dituntut ikut bertanggungjawab untuk meredakan dan mengatasinya.

Catatan kedua, dalam rangka memuluskan politik identitas di atas, tidak jarang para politisi memproduksi ragam berita bohong yang mendorong ujaran kebencian dan menyumbang perpecahan di masyarakat. Berita bohong, atau lebih dikenal dengan sebutan hoax, sengaja dibuat tim para pemenang untuk menjatuhkan lawan politik dengan ragam berita bohong. Sebelum masa media sosial berkembang, berita bohong lebih banyak beredar dari mulut ke mulut dan terbatas di masa atau wilayah tertentu. Seiring pertumbuhan internet, media sosial pun berkembang luas karenanya berita bohong pun tumbuh dan berkembang. Berita bohong tidak lagi terkendali ketika media sosial kini berada di tangan para penggunanya melalui telepon genggam pintar (*smart phone*). Asal terhubung internet, semua informasi baik berita kredibel maupun berita bohong beredar. Peredaran berita bohong itu umumnya melalui situs berita abal-abal, yang tidak terdaftar di lembaga negara seperti Dewan Pers.

Hal lain yang perlu dicatat dari perjalanan 20 tahun reformasi adalah masyarakat kita semakin sensitif, mudah tersinggung, dan rentan terhadap provokasi. Catatan ini terkait dengan politik identitas, berita bohong, dan ujaran kebencian, yang menguat dan pada saat yang sama membuat hubungan sosial terpilah-pilah berdasarkan kubu-kubu politik. Ditambah lagi, laju kecepatan internet yang menyediakan informasi, berita benar maupun berita palsu, melebihi kecepatan kita berpikir. Belum sempat kita mencerna, memikirkan, dan memaknai berita yang sampai ke telepon genggam, apakah benar atau tidak, berita baru sudah muncul lagi, lagi dan lagi. Hanya sebagian dari antara mereka menyisihkan waktu untuk merenungkan berita yang masuk di akun media sosialnya. Dari mereka yang mau menyeleksi berita, tidak semua memiliki kemampuan yang memadai untuk memeriksa apakah berita itu benar atau tidak.

Mengingat hanya sedikit yang mau dan mampu memeriksa kebenaran informasi di media sosial, maka tidak heran jika di antara kita yang tidak mau dan mampu mencerna berita mudah marah. Mereka mudah termakan hasutan untuk membenci apa saja yang kemukakan orang lain, bukan pada perkataannya. K.H. Mustaf Bisri menulis berita gambar di *Instagram*, "Soalnya bukan 'setuju atau tidak setuju', tetapi 'sekubu atau tidak sekubu'," pada kaligrafi pepatah imam Ali r.a.: *undzur ma qoola, wala tandzur man qola*. Sikap demikian itu, yang mengedepankan orang daripada isi pembicaraan itu rentan terprovokasi. Akibat terjauh, terjadi ketegangan antar kelompok masyarakat, dan bahkan kekerasan. Jika itu terjadi, siapa yang menghadapinya? Lagi-lagi, petugas negara seperti penyuluh agama yang mau tidak mau harus menghadapinya.

Kenyataan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan: Bagaimana cara memperkuat ketahanan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi? Siapa saja yang sebaiknya terlibat? Apa saja langkah-langkah awal untuk mempertahankan masyarakat tahan banting dari provokasi? Sebelum menjawab pertanyaan ini, beberapa pertanyaan berikut patut dijelaskan terlebih dahulu: Mengapa masyarakat kita rentan terhadap politik pecah

belah? Mengapa politik identitas seperti bagian tidak terelakkan dari sistem politik demokrasi?

Tulisan ini mengajukan argumen bahwa demokrasi merupakan sistem paling baik bagi masyarakat Indonesia yang plural, khususnya umat Islam yang tumbuh dalam beragam tradisi, budaya, dan bahasa di ribuan pulau di Indonesia. Namun, penulis mengakui bahwa demokrasi juga secara inheren membuka peluang bagi tumbuhnya politik identitas yang seringkali berdampak buruk. Daripada frustrasi atas dampak tersebut, jauh lebih baik jika kita hadapi saja dan rebut tafsir politik identitas untuk makna yang lebih positif. Politik identitas pada dasarnya bisa bermanfaat bagi umat jika ia diarahkan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam berbagai bidang di ruang publik. Politik identitas menjadi buruk jika diletakkan dalam kerangka permusuhan dibanding persaingan. Mengingat yang terakhir ini selalu ada, yakni permusuhan daripada persaingan, ketahanan sosial karenanya menjadi pekerjaan rumah kita bersama.

Lalu bagaimana membentengi masyarakat agar kebal terhadap provokasi politik identitas? Jawaban paling umum dan sudah diajukan sejumlah sarjana adalah dialog. Secara teoretik, dialog menjanjikan sebagai jalan keluar. Sayangnya, dialog pada umumnya hanya dilakukan di level elit. Sementara di akar rumput dialog tidak mencukupi. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, penulis mengusulkan penguatan kohesi sosial sebagai pelengkap dialog dalam rangka menebalkan ketahanan masyarakat dari ragam provokasi. Kohesi sosial tersebut, penulis lengkapi dengan teori *interreligious engagement* yang penulis pinjam dari Izak Y. M. Lattu Ph.D., dosen tamu Sekolah Pascasarjana program studi agama dan lintas budaya (CRCS)¹, Universitas Gadjah Mada, yang terdiri dari empat unsur: Keterlibatan struktural, keterlibatan asosiasi, keterlibatan dalam kegiatan sehari-hari, dan keterlibatan simbolis/kebudayaan. Apabila keempat unsur kohesi sosial tercermin di masyarakat, provokasi jenis apapun akan diserap masyarakat dengan kepala dingin.

Untuk memaparkan argumen di atas, sesudah pendahuluan, tulisan ini mendiskusikan tentang demokrasi dan model-modelnya. Pada bagian ini, diskusi fokus pada mengapa demokrasi adalah sistem paling cocok dengan masyarakat Indonesia. Bagian berikutnya, tulisan ini mendiskusikan hal ihwal tentang politik identitas, berita bohong, ujaran kebencian, dan pelintiran kebencian oleh berbagai pihak untuk kepentingan politik di masyarakat. Selanjutnya, tulisan ini akan memaparkan beberapa argumen untuk menjelaskan kenapa masyarakat bisa rentan terhadap provokasi di era demokrasi yang serba terbuka ini. Pada umumnya, orang akan mengaitkan kerentanan ini dengan latar belakang ideologi keagamaan, nasionalisme, atau kurang pergaulan di ranah sosial. Bagian terakhir, tulisan ini akan mengupas kohesi sosial sebagai pendekatan baru untuk melengkapi konsep dialog yang lebih melibatkan masyarakat dalam berbagai segi, termasuk simbol dan kultur, selain unsur struktural dan hubungan sosial sehari-hari. Setelah mengurai pendekatan kohesi sosial tersebut, tulisan ini akan menutup dengan beberapa kesimpulan dan rekomendasi.

B. Landasan Teori

1. Makna Demokrasi

Pertanyaannya, mengapa demokrasi? Demokrasi secara bahasa berarti *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan). Dari dua kata ini, demokrasi dimengerti sebagai sistem pemerintahan yang sepenuhnya di bawah kedaulatan rakyat. Kita sering mendengar arti demokrasi yang berarti kekuasaan yang dititipkan dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Pengertian ini menjadi khas demokrasi manakala kita bedakan dari pemerintahan teokrasi, yang mengklaim berkuasa atas perintah Tuhan melalui wangsit, ilham, atau hasil pertapaan. Sementara pemerintahan teokrasi dipimpin seorang raja atas legitimasi pemimpin agama, pemimpin demokratis berkuasa di atas kedaulatan rakyat. Demokrasi juga menjadi khas ketika kita bandingkan dengan

pemerintahan monarki, atau kekuasaan di tangan raja dan para penerus raja. Berbeda dari monarki, sistem demokrasi memberi kesempatan kepada raja, keturunan raja, polisi, anak keturunan politisi, dan rakyat biasa untuk ikut berkompetisi meraih kekuasaan.

Namun demikian, demokrasi itu juga secara teori tidak bermakna tunggal. Demokrasi bisa kita bagi, tanpa niat simplifikasi, menjadi dua aliran besar: teori klasik dan modern. Pada teori klasik, kata kunci dalam sistem demokrasi adalah kehendak rakyat, kebaikan bersama, dan kebajikan publik.² Menurut teori klasik ini, sistem pemerintahan sah disebut demokratis jika tujuan akhirnya berorientasi untuk memenuhi kehendak rakyat. Kehendak rakyat itu bisa dilihat dari apa saja yang mereka usulkan melalui perwakilan mereka di parlemen. Usulan, kritik, dan saran anggota parlemen adalah representasi kehendak rakyat. Semakin banyak kehendak rakyat melalui parlemen itu dipenuhi, semakin demokratis suatu negara. Kemudian, 'kebaikan bersama' menjadi tolok ukur selanjutnya. Kebaikan bersama di sini perlu dipahami dalam konteks argumen dalam memberikan usul di parlemen melalui wakil-wakilnya. Setiap argumen harus mempertimbangkan kebajikan bagi semua pihak di masyarakat, tanpa membedakan latar belakangnya. Alat ukur demokrasi lainnya adalah kebijakan publik. Kebijakan publik berarti keputusan yang pemerintah ambil untuk melayani dan memberi kepuasan kepada publik. Publik di sini berarti rakyat, entah mendukung pemerintah maupun mendukung oposisi. Sistem demokrasi, menurut teori klasik, singkatnya tidak akan berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya tidak menjiwai prinsip-prinsip demokrasi berupa kehendak rakyat, kebaikan bersama, dan kebijakan untuk publik.

Teori di atas dikoreksi pemikir modern, khususnya Joseph Schumpeter dalam bukunya *Capitalism, Socialism and Democracy* (1942). Menurut Schumpeter, apa yang menjadi tujuan demokrasi pada dasarnya adalah hasil dari proses dan mekanisme politik. Hasil yang baik dan demokratis hanya bisa diperoleh melalui proses dan metode tertentu. Dalam kata-katanya, "the democratic method is that institutional arrangement for

arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people's vote (metode demokrasi adalah aransemen kelembagaan bagi pencapaian keputusan politik yang mana seseorang memperoleh kekuasaan untuk memutuskan melalui perjuangan kompetitif memperebutkan suara rakyat)".³Merujuk pendapatnya ini, Schumpeter menekankan bahwa demokrasi adalah proses kompetisi untuk menemukan kepemimpinan politik. Jadi, tujuan akhir berupa pelayanan untuk memenuhi kehendak dan harapan publik hanya diperoleh melalui kompetisi yang sehat dalam memperoleh kepemimpinan politik, orang yang dengan kekuasannya mengambil keputusan-keputusan politik.

Bagaimana menghasilkan kepemimpinan politik tersebut? Jawabannya adalah memperebutkan suara rakyat. Kepemimpinan politik dalam demokrasi sejatinya menggambarkan kehendak rakyat yang diamanatkan kepada seorang pemimpin. Sikap, perilaku, dan keputusan seorang pemimpin, kepala negara atau daerah, dalam demokrasi pada dasarnya mencerminkan wajah para pemilihnya. Singkatnya, Schumpeter menekankan pada aspek yang lebih empiric pada proses sebelum mendiskusikan hasil atau tujuan.

Meneruskan gagasan tersebut, Larry Diamond, Juan J Linz, dan Seymour M. Lipset dalam buku *Crafting State-Nation: India and Other Multinational Democracies* (2011) menyebutkan tiga kriteria pokok demokrasi.⁴ Pertama, kompetisi. Sistem bernegara disebut demokratis jika setiap warga negara dan atau organisasi warga berkompetisi memperebutkan jabatan publik secara regular dan bebas dari paksaan. Kedua, partisipasi. Negara demokratis mensyaratkan keterlibatan sebanyak mungkin warga negara dalam proses pemilihan umum atau penentuan kebijakan publik. Keterlibatan ini perlu ditekankan untuk menunjukkan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang dikecualikan. Semua warga negara berhak ikut serta dalam proses demokrasi. Terakhir, kebebasan sipil dan politik. Negara demokrasi ditandai oleh kebebasan

warganya berbicara, berekspresi, berorganisasi, berserikat tanpa rasa takut. Mereka mendapatkan hak untuk beragama dan berkeyakinan sesuai dengan hati nurani. Mereka bebas memilih partai politik mana pun sebagai kendaraan untuk menyalurkan kepentingannya.

Secara garis besar bisa disimpulkan bahwa demokrasi mensyaratkan kompetisi dalam setiap langkap politik. Kompetisi itu di sisi lain mensyaratkan partisipasi masyarakat baik dalam memilih pemimpin atau mengawasi kepemimpinan kepala negara terpilih. Meski angka partisipasi dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah di Indonesia belum melebihi 70 persen, partisipasi dalam pengawasan kinerja pemerintahan sudah berjalan.⁵ Pada akhirnya, kompetisi dan partisipasi tersebut berorientasi pada kebebasan sipil dan politik warga negara. Secara umum, pemerintah kita memberi keleluasaan kepada setiap warga untuk berpendapat, berorganisasi, berpolitik, dan berpolemik sebagai wujud dari kebebasan sipil yang menjadi syarat penting dalam demokrasi.

2. Politik Identitas

Sebelum lebih jauh mendiskusikan politik identitas, tulisan ini akan mengulas dahulu politik dan identitas sebagaimana dibicarakan para ahli. Tidak ada makna tunggal apa itu politik. Tulisan ini merujuk pada definisi teori *rational choices* (pilihan rasional), yang mendefinisikan politik sebagai arena di mana semua orang ingin menyalurkan aspirasi dan kepentingannya dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya.⁶ Atas dasar definisi ini, politik karenanya merupakan seni meraih kekuasaan. Politik terkait erat dengan siapa menguasai apa di lembaga-lembaga formal, dalam hal ini negara.

Dalam maknanya yang luas, politik tidak harus berkenaan dengan lembaga formal. Dalam sistem politik demokratis, politik berarti seni bagaimana seseorang atau sekelompok orang meraih kekuasaan dengan cara meyakinkan para pemilih bahwa dia atau kelompoknya paling

terpercaya mengelola negara. Meski persaingan dilakukan di ranah formal, tetapi semua pihak akan memanfaatkan pengaruh non-formal di masyarakat, yang berbasis kultur dan tradisional.

Untuk mempertajam diskusi, para sarjana bertanya dari mana identitas berasal? Apakah identitas bersifat individual atau komunitas? Setidaknya ada dua aliran dalam ilmu sosial menjawab pertanyaan ini. *Pertama*, aliran esensialis. Aliran ini berpendapat bahwa identitas pada dasarnya bawaan sejak sebelum lahir, atau alamiah. Identitas melekat pada diri seseorang sejak diciptakan Tuhan di alam sebelum lahir. Identitas seseorang etnis Sunda misalnya adalah bawaan karena dia lahir dari rahim ibu dan ayah etnis Sunda. Kalaupun ada percampuran antara etnis Sunda dan Jawa misalnya, percampuran tersebut sudah melekat sejak dalam kandungan. Begitu juga dengan identitas agama, bahasa, budaya, dan adat, bagi aliran ini, melekat pada seseorang sejak dalam kandungan ibu. Lalu bagaimana dengan perubahan setelah seseorang dewasa? Menurut aliran ini, perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan seseorang mesti di atas identitas dasar yang alamiah dan bawaan yang tidak bisa berubah. Misalnya, seberapa jauh pun seseorang berubah, identitas etnis seseorang tidak akan berubah. Aliran ini pada umumnya percaya bahwa identitas yang alamiah itu ciptaan Tuhan bersamaan dengan penciptaan fisik.⁷

Kedua, aliran konstruktivisme.⁸ Aliran ini berpandangan bahwa identitas manusia adalah hasil bentukan lingkungan di mana ia lahir, tumbuh, dan berkembang. Seseorang yang lahir dari keluarga Jawa, maka identitas yang melekat padanya merupakan hasil bentukan lingkungannya. Identitas keagamaan seseorang juga adalah bentukan masyarakat di mana ia lahir. Teori ini sedikit banyak sejalan dengan perkataan nabi Muhammad Saw. bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bening, kecuali keluarganya yang membentuknya menjadi Islam, Kristen, Yahudi atau lainnya. Bagi aliran ini, identitas seseorang akan terus bertumbuh. Ketika seorang etnis Jawa menikah dengan etnis Papua, maka mereka akan menghasilkan identitas baru

hasil perkawinan keduanya. Adat kebiasaan masing-masing akan saling memengaruhi identitas yang akan menjadi dasar bagi perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dari aliran pertama, bagi aliran ini, identitas tidak ada yang dibawa seseorang sejak lahir kecuali hasil bentukan lingkungannya.

Tulisan ini mengadopsi kedua aliran dalam memahami dari mana identitas berasal dengan rumusan sebagai dari identitas adalah bawaan dan sebagian lainnya merupakan bentukan lingkungan. Rumusan ini berusaha menengahi perbedaan tajam antara esensialis dan konstruktivis. Identitas berupa ras, etnis, warna kulit, kelamin, adalah di antara bawaan dari lahir. Seseorang tidak bisa meminta dilahirkan dari keluarga ras mana, etnis mana, dan jenis kelamin apa. Semua itu terberi (*given*) sejak seseorang dalam kandungan. Akan tetapi, ada aspek dari identitas manusia yang terbentuk karena pergaulan di lingkungan. Misalnya bahasa. Seseorang etnis Sunda akan bisa berbahasa Bugis jika dia tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Lingkungan Makassar membentuk kemampuan seorang Sunda Berbahasa Bugis. Seseorang yang terlahir sebagai Muslim di lingkungan Nahdlatul Ulama sangat mungkin menjadi anggota organisasi Muhammadiyah setelah bergaul dan berteman dengan tokoh yang dikaguminya di Muhammadiyah, dan begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, tulisan ini berpendapat bahwa penjelasan aliran campuran yang paling masuk: Sebagian bawaan yang tidak bisa berubah dan sebagian lainnya bentukan yang bisa berubah seiring lingkungan. Umumnya, identitas bawaan adalah segala sesuatu yang melekat dengan fisik, seperti jenis kelamin, warna kulit, dan lainnya. Sementara, identitas yang bisa berubah adalah segala sesuatu yang tidak melekat dengan fisik, seperti sikap dan perilaku. Akan tetapi, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, warna kulit kini bisa diubah melalui operasi plastik. Kita ingat Michel Jackson, yang berkali-kali operasi plastik, yang tadinya kulit berwarna gelap menjadi putih. Bahkan, di beberapa negara operasi jenis kelamin telah berhasil

dilakukan pada beberapa orang yang menginginkannya. Meski begitu, perubahan pada fisik ini hanya terjadi pada sebagian kecil saja dibanding jumlah penduduk di dunia yang menerima kenyataan fisik sebagaimana pemberian sejak lahir. Singkatnya, identitas tidak lah tunggal pada saat yang sama tidaklah beku melainkan cair dan bisa berubah.

Apabila kita mulai satukan antara politik dan identitas, menjadi politik identitas, bagaimana memahaminya? Sebagaimana dijelaskan di atas, politik adalah seni meraih kekuasaan melalui usaha memengaruhi pemilih; sementara itu, identitas sebagian tak berubah dan sebagian lainnya berubah. Identitas juga tidak tunggal pada setiap orang. Berdasarkan pemahaman tersebut, politik identitas bisa kita pahami sebagai usaha seseorang atau sekelompok orang untuk meraih kekuasaan dengan memanfaatkan kesamaan identitas tertentu dengan mayoritas para pemilihnya. Contohnya, pada suatu desa akan dilakukan pemilihan kepala desa. Calon kepala desa berkampanye bahwa jika dia terpilih maka akan dibuatkan turnamen burung setiap dua minggu sehingga hobi mayoritas warga akan tersalurkan setiap dua minggu. Calon kepala desa tersebut mengedepankan identitas pecinta burung karena dia tahu mayoritas penduduk desa pecinta burung. Sampai di sini, politik identitas belum menjadi masalah karena dalam usaha meyakinkan pemilih bisa dengan apa saja.

Politik identitas menjadi masalah di negeri yang beragam seperti Indonesia karena tiga hal berikut. *Pertama*, politik identitas berpotensi mengecilkan bahkan menghilangkan identitas lain yang hidup di masyarakat. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, identitas pada setiap individu ada banyak dan cair. Demikian juga dengan sekumpulan orang di dalam komunitas, di satu kabupaten/kota, atau negara, identitas lebih banyak dan rumit. Untuk kepentingan politiknya, politisi dengan sengaja mengedepankan satu identitas yang dianggap paling bisa membujuk warga agar memilihnya saat pemilihan umum. Bukan saja menonjolkan identitas tertentu, lebih jauh dari itu menjanjikan akan mengistimewakan mereka yang berasal dari identitas tersebut. Ketika kelak terpilih dan janji

tersebut dia penuh, maka warga negara yang beda identitas tidak turut menikmati kebijakan tersebut. Sejak keputusan tersebut diputuskan, sang politisi mulai mendiskriminasi mereka yang tidak satu kubu dengannya. Lebih jauh, identitas lain yang kecil jumlahnya tidak saja dikecilkan, tetapi juga berpotensi dianggap tidak ada.

Kedua, politik identitas menutupi perdebatan program kerja berkualitas. Demokrasi seharusnya menjadi arena berbagai pihak memperebutkan pengaruh di masyarakat dengan menyodorkan program kerja terbaik untuk memperbaiki aspek-aspek di masyarakat yang masih buruk. Semakin baik program kerja yang ditawarkan, semakin para pemilih menyukai dan akan memilih. Memilih mereka yang mengusulkan program paling baik berarti mempercayakan kekuasaan dikelola oleh pemimpin terbaik. Kenyataannya, politisi yang mengeksploitasi identitas kurang menyediakan waktu untuk menunjukkan program terbaik karena dia akan sibuk mencari penjelasan tentang betapa hebatnya orang dari identitas tersebut, sehingga dia secara esensial layak menjadi pemimpin.

Politik identitas membuat pemilih kurang memperhatikan program kerja karena yang mereka desakkan adalah kesamaan identitas. Mereka meyakini bahwa jika dipimpin identitas lain, maka hancurlah anggota yang berasal dari identitas tersebut. Jika program kerja berkualitas tak lagi menjadi fokus, siapa yang dirugikan? Sebagian besar warga, tentu saja. Pada sisi ini juga, singkatnya, politik identitas bermasalah.

Terakhir, politik identitas lebih banyak memecah belah daripada mempersatukan masyarakat. Para pendukung merasa identitas mereka adalah kelompok pilihan ciptaan “terbaik” yang akan menyelesaikan masalah di daerahnya. Pada saat yang sama, mereka menumbuhkan narasi bahwa pihak lain merupakan titisan “tidak baik”. Jika daerah atau negara dipimpin oleh mereka yang berasal dari identitas “tidak baik”, maka ia membawa kehancuran. Adu narasi ini berpotensi adu gengsi antara pendukung kedua pihak. Adu gengsi, adu narasi paling baik, sekaligus adu buruk lawan politik terbawa setelah kontestasi pemilu

usai. Kebencian pendukung kubu A kepada kubu B berlanjut hingga pemilu lainnya atau pemilu berikutnya atas dasar bahwa mereka yang dari kelompok dirinya lah yang paling baik untuk memimpin.

Harus diakui bahwa politik identitas tidak bisa dihindari. Meski begitu, tidak ada pilihan lain bagi kita selain mewaspadainya. Kita tidak bisa menghapuskan politik identitas begitu saja, tetapi perlu mengendalikannya. Identitas pada dasarnya cair dan beragam. Sementara politik identitas berusaha menyeragamkan sekaligus membekukan identitas di masyarakat. Mengendalikan identitas artinya mengembalikan ke wujud aslinya yang beragam dan cari.

Namun demikian, mencairkan identitas kian rumit di era media sosial. Perkembangan teknologi informasi yang memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya media sosial pada tingkat tertentu menyumbang banyak pada pengentalan identitas, bahkan lebih jauh membuat masyarakat lebih sensitif terhadap perbedaan. Bagaimana media sosial berkontribusi kepada pengentalan politik identitas?

C. Pelintiran Kebencian di Media Sosial

Indonesia saat ini tercatat sebagai tiga besar pengguna media sosial di dunia. Data April 2018, Indonesia merupakan pengguna *Facebook* terbanyak ketiga (140 juta), setelah Amerika (240 juta), dan India (270 juta) pengguna. Sementara itu, Indonesia merupakan keempat terbanyak pengguna *Instagram*(56 juta), setelah India (59 juta), Brazil (61 juta), dan Amerika (120 juta) akun.⁹ Itu data skala dunia. Bagaimana dengan data nasional? Berdasarkan data Globalwebindeks, pengguna *YouTube* adalah platform media sosial yang paling sering digunakan (43 persen), disusul *Facebook* (41 persen), dan *WhatsApp* (40 persen). Data ini memperlihatkan bahwa media sosial di Indonesia merupakan sarana efektif sebagai arena kampanye. Politik identitas mau tidak mau memanfaatkan kenyataan ini sebagai arena kampanye, bersaing dengan kampanye berdasarkan program kerja.

Pada beberapa ajang pemilihan langsung kepala daerah di Indonesia, tim sukses para kandidat telah menyadari dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye, selain media mainstream lainnya. Setiap kandidat kampanye di media massa sesuai dengan jadwal kampanye terbuka. Mereka juga kampanye di media sosial secara kreatif. Beredar materi kampanye berupa video, ilustrasi, komik, dan gambar-gambar terbaik. Materi tersebut menyebar mulai dari *YouTube*, *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, hingga game online yang dimainkan para pemilih pemula. Mereka berkampanye melalui akun resmipartai politik, akun kandidat, dan akun selebritis para pendukung kandidat. Pada pemilihan langsung inilah, materi yang beredar kampanye bukan hanya positif dan kreatif, tetapi negatif dan destruktif.

Pertanyaan yang segera mengemuka, bagaimana menjelaskan kampanye kreatif dilakukan bersamaan dengan kampanye destruktif? Para kandidat, atau tim sukses di belakang para kandidat tidak percaya diri dengan program kerja yang diajukan bila tanpa dehumanisasi lawan politik. Tidak percaya diri berarti sang kandidat tidak terlampau yakin bahwa program yang diajukannya akan diterima dan dipilih para pemilih sebagai program terbaik. Tidak percaya diri juga berarti dia sendiri tidak yakin bahwa apa yang diajukannya benar-benar masuk akal dan bisa dijalankan jika dia memenangi persaingan. Akibatnya, kedua belah pihak perlu melakukan dehumanisasi lawannya. Dehumanisasi di sini berarti menjatuhkan harkat dan martabat kemanusiaan lawan politik untuk menunjukkan bahwa orang tersebut tidak kompeten memimpin bangsa. Bila kampanye kreatif memerlukan data untuk menopang program kerja dengan segala alat ukur yang akurat, kampanye destruktif justru tidak membutuhkan data, malah bila perlu membuat fitnah tentang sosok lawan politiknya.

Produksi fitnah tidak secara langsung disusun di media sosial, melainkan melalui media yang seakan-akan mainstream. Media mainstream tidak akan menerima berita kampanye di satu sisi, dan tidak akan mau menuliskan tanpa prinsip klarifikasi kepada para narasumber.

Meskipun kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa ada di antara media yang sudah dikenal mainstream tidak memberitakan salah satu kandidat secara proporsional. Karena itu, mereka membutuhkan media sendiri. Mereka buatlah media seakan-akan mainstream dari sisi tampilan dan nama, padahal situs abal-abal. Media semacam ini tidak memenuhi atau bahkan dengan sengaja mengabaikan prinsip jurnalisme. Fitnah sengaja dibuat dengan maksud menjatuhkan gambaran tentang lawan politik di hadapan pemilih, yang kemudian diedarkan melalui media sosial.

Produksi berita palsu dan fitnah akan selalu seiring dengan ujaran kebencian. Berita palsu perlu dibahasakan dengan gambaran tentang lawan politik yang sebisa mungkin menimbulkan rasa amarah para pemilihnya. Yang ditembak oleh berita palsu, ujaran kebencian, dan pelintiran kebencian adalah identitas objek untuk kepentingan politik. Di sinilah sisi jahatnya politik identitas dalam mempromosikan kandidat yang didukung sekaligus menjatuhkan kandidat lawan dengan kebohongan.

Kebencian dalam politik identitas tidak hanya disebarluaskan, tetapi dipelintir sedemikian rupa. Mari sejenak menengok temuan riset Cherian George dalam buku, yang telah diterjemahkan PUSAD Paramadina, *Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy* (2016). George membedakan antara ujaran kebencian (*hate speech*) dan pelintiran kebencian (*hate spin*). Keduanya sama-sama berkaitan dengan kebencian. Jika ujaran kebencian menyerang pihak lain secara langsung, pelintiran kebencian menggabungkan ujaran kebencian dengan kemarahan akibat ketersinggungan. Pada ujaran kebencian, dengan atau tanpa hoax, pengujar akan dengan terang-terangan mengajak untuk menghakimi atau merusak pihak yang dibenci.¹⁰

Sementara itu, pelintiran kebencian tidak secara langsung mengajak massa menyerang pihak lain. Menurut Cherian George, pelintiran kebencian memerlukan dua sisi: sisi hasutan dan sisi keterhasutan. Agar

bisa menghasut, pemelintir perlu isu. Namanya hasutan, isu yang diangkat mesti perkara yang tidak jelas atau bila perlu bohong. Dalam konteks ini, berita palsu adalah barang paling pas untuk menghasut. Ketika hasutan melalui hoax sudah sampai ke masyarakat, pada gilirannya mereka akan menimbulkan kemarahan, alias mereka terhasut. Semakin banyak orang terhasut, semakin berhasil ia sebagai pemelintir kebencian. Dengan demikian, semakin besar pula peluang mereka memobilisasi untuk gerakan massa yang lebih luas. Hoax, dengan demikian, adalah unsur yang merusak, alih-alih memperkuat, demokrasi. Keterlibatan warga negara untuk turut memantau pemerintah dengan cara propaganda politik melalui menyebarkan berita bohong tidak memberi manfaat apa-apa. Hoax justru memperburuk hubungan antara warga dengan pemerintah karena materi yang menghubungkan keduanya kebohongan, alias berita yang dibuat-buat.¹¹

Sampai di sini, tulisan ini sudah membahas tentang apa, bagaimana, dan mengapa demokrasi menggiring pada politik elektoral yang berakibat pada politik identitas. Politik identitas itu, pada gilirannya, telah melahirkan di antaranya peredaran berita bohong dan ujaran kebencian yang menjadi tantangan bangsa Indonesia hari ini dan masa yang akan datang.

D. Faktor Masyarakat Rentan Terhadap Provokasi

Pertanyaan berikutnya, mengapa masyarakat kita lebih sensitif belakangan ini dibanding sebelumnya sehingga mudah diajak dan diprovokasi berita-berita palsu? Ada beberapa kemungkinan jawaban atas pertanyaan tersebut. Tulisan ini akan mendiskusikan secara kritis tiga jawaban atas pertanyaan tersebut: ideologi agama yang eksklusif, nasionalisme, dan interaksi sosial.

1. Ideologi Agama yang Eksklusif

Pedapat pertama untuk menjelaskan kenapa umat teramat sensitif adalah ideologi keagamaan yang eksklusif. Penjelasan ini memandang

bahwa setiap orang dipengaruhi ideologi keagamaan dalam menilai dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Ideologi keagamaan yang dimaksud adalah ide atau gagasan yang bersumber dari ajaran agama berdasarkan tafsir seorang atau beberapa penafsir dengan maksud agar ide tersebut menjadi aturan main di masyarakat. Agama sebagai ideologi tidak hanya mengambil ajaran untuk dipraktikkan pada tataran ritual, melainkan juga diterapkan menjadi regulasi sosial dan regulasi negara. Contoh paling dekat adalah keinginan sebagian umat Islam untuk menerapkan syariat Islam melalui ide khilafah. Ide khilafah diambil dari ajaran Islam yang ditafsirkan oleh penafsir di lingkungan organisasi Hizb at-Tahrir di dunia, yang berorientasi menjadi aturan main bersama menggantikan model demokrasi.

Berbicara mengenai tafsir keagamaan yang menjadi ideologi, khususnya dalam tradisi Islam, paling tidak ada dua kecenderungan. Kecenderungan pertama, tafsir keagamaan literal. Dalam tradisi Islam, misalnya, tafsir literal menekankan pembacaan dan pemaknaan atas al-Quran dan Hadits sebagaimana bunyi teks. Untuk menjadi ideologi keagamaan, tafsir literal biasanya secara khusus terkait ajaran Islam terkait sosial politik. Misalnya hukum-hukum yang menjadi turunan dari Syariat Islam. Bagi kecenderungan tafsir literal ini, Syariat Islam hanya satu dan bersifat final sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran. Salah satu contohnya hukum potong tangan bagi pencuri. Menurut kecenderungan ini, pelaku tindakan pencurian harus menerima akibat tangan dipotong sebagai bunyi dalam al-Quran. Demikian juga dengan hukum bagi orang yang diduga melakukan zina. Meskipun mengikuti sebagaimana tertera literal, kecenderungan ini merupakan tafsir karena keputusan untuk memberi makna sebagaimana bunyi adalah satu dari sekian makna yang mungkin dari teks tersebut. Seperti pada contoh di atas, potong tangan memungkinkan diterjemahkan dengan memotong kuasanya untuk mencuri kembali, tidak berarti tangan.

Kecenderungan kedua, tafsir kontekstual. Pada kecenderungan ini, kembali contohnya dalam tradisi Islam, ayat al-Quran dan Hadits

khususnya terkait sosial politik akan dilihat konteks ketika keduanya turun pada masa Nabi Muhammad dan mengambil nilai universal di baliknya untuk disesuaikan dengan konteks saat ini. Model tafsir ini, diajukan oleh Fazlur Rahman dalam bukunya *Islam*, dua gerakan (double movement): melihat konteks masa Nabi, mengambil nilai universal, dan membawa untuk memberi jawaban atas persoalan pada konteks saat ini.¹² Seperti pada contoh di atas mengenai potong tangan bagi pencuri. Bagi pendekatan ini, potong tangan dalam ayat tersebut perlu diteliti pada masa itu konteksnya misalnya hukuman yang bisa melemahkan kemampuan untuk mencuri. Nilai moral agar tidak memiliki kemampuan mencuri lagi, maka pada konteks saat ini tidak perlu potong tangan melainkan penjara dengan sejumlah kerja sosial. Idealnya, para pencuri di penjara tidak memiliki kemampuan untuk mencuri, tetapi sekaligus diberi pelatihan kerja yang halal agar ketika keluar penjara ada alternatif pekerjaan daripada mencuri. Begitu juga dengan makna Syariat Islam ditafsirkan sesuai dengan konteks pada zaman Nabi dan saat ini.

Kedua kecenderungan tersebut berebut tempat di dalam sistem politik demokratis. Mereka, baik pada kecenderungan pertama maupun kedua, mengekspresikan dalam beragam bentuk. HTI misalnya sebagai bagian dari kecenderungan pertama tidak mau ikut terlibat dalam kontestasi demokratis karena bagi mereka sistem terbaik hanya ada di khilafah. Demokrasi merupakan sistem dari Barat yang mereka tolak. Tetapi, ada kelompok lain yang berada di kecenderungan pertama yang bersaing menerapkan apa yang diyakini sebagai syariat Islam melalui jalur demokrasi.

Demikian juga dengan mereka yang berada di kecenderungan kedua tafsir kontekstual mengekspresikan dalam beragam bentuk. Ada di antara mereka yang bersaing melalui jalur partai politik. Ada juga yang memperjuangkan tafsir kontekstual sebagai ideologi bersama melalui jalur pendidikan dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Betapapun mereka berbeda jalur, mereka diikat oleh keyakinan yang sama bahwa Syariat Islam perlu ditegakkan di Indonesia, akan tetapi dengan

mempertimbangkan konteks keindonesiaan dan kemodernan. Dalam konteks Indonesia, tafsir Syariah Islam tersebut sudah terangkum dalam Pancasila, Konstitusi, dan UUD 1945. Jika terjadi amandemen atau revisi terhadap UU turunannya dan merujuk pada ajaran Islam, mereka akan menafsir ajaran tersebut berdasarkan konteks dan mendialogkan dengan kecenderungan pertama, dan dengan partai politik lain yang ideologinya tidak secara langsung dari agama, melainkan nasionalisme.

2. Nasionalisme

Penjelasan lain yang mungkin untuk memahami mengapa bangsa Indonesia belakangan begitu sensitif jika ada provokasi dari politik identitas adalah nasionalisme. Wacana mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai harga mata begitu kuat sebagai jawaban terhadap wacana lain dari kaum radikal ekstremis yang menginginkan menggantikan NKRI dengan sistem politik trans-nasional. Mengingat narasi NKRI harga mati, ideologi apapun yang sepertinya disuarakan selain model nasionalisme tersebut akan menjadi sasaran dari politik identitas yang akan dikecilkan. Maka, kita tidak heran jika masyarakat mudah sekali terpancing untuk menuding seseorang menganut komunisme jika ada tanda-tanda yang mendekati lambang PKI. Misalnya, pernah suatu hari di Indonesia begitu sensitif terhadap partai politik tertentu karena warna lambangnya mirip atau dihubungkan dengan PKI.

Atas nama nasionalisme, pemerintah Indonesia membubarkan Hizb Tahrir Indonesia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia telah mencabut status hukum HTI pada tahun 2017. Ini berarti bahwa HTI sekarang adalah organisasi agama terlarang di Indonesia. Pemerintah Indonesia berpendapat ada tiga alasan di balik keputusan tersebut. Pertama, HTI sering dianggap tidak mengambil peran positif dalam kerangka nasional dalam mencapai tujuan nasional. Kedua, HTI juga dianggap memiliki ide-ide yang bertentangan dengan tujuan, prinsip dan karakteristik

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2013 tentang organisasi sipil. Ketiga, aktivis HTI dianggap telah mengambil isu di masyarakat yang membahayakan integritas NKRI selain mengancam keamanan dan ketertiban umum. Dari ketiga argumen ini, argumen kedua adalah alasan khusus untuk membubarkan HTI karena dua hal lainnya dapat terjadi pada organisasi sosial mana pun di Indonesia.

Dilihat dari dua kasus di atas, nasionalisme tampaknya memang mendorong orang bersikap diskriminatif terhadap pihak tertentu. Jika nasionalisme pendorong utama, seharusnya mayoritas bangsa Indonesia akan saling usir satu sama lain karena nasionalisme sebagaimana dikatakan di atas adalah wacana yang tengah menguat di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa nasionalisme hanya mendorong sebagian pihak saja yang terdorong mengucilkan pihak lainnya yang dianggap akan mengganggu keutuhan bangsa Indonesia. Ini artinya, nasionalisme yang mengampanyekan NKRI harga mati hanya menjelaskan sebagian orang, tetapi gagal menjelaskan sebagian lainnya yang tidak mudah terprovokasi.

3. Interaksi sosial

Penjelasan ideologi keagamaan dan nasionalisme sudah terbukti gagal menjelaskan kenapa sebagian dari bangsa Indonesia mudah terprovokasi politik identitas yang memecah belah. Adakah penjelasan lain? Tulisan ini berpendapat bahwa yang menjadi soal bukan pada ideologi keagamaan, bukan juga pada keyakinan mengenai nasionalisme, tetapi keterbatasan mereka yang mudah terprovokasi dalam berinteraksi di lingkungannya.

Keterbatasan ini bukan berarti mereka eksklusif atau tidak mudah bergaul dengan orang di sekitarnya, akan tetapi mereka tidak memiliki ikatan intim dengan orang yang berbeda di komunitasnya. Rumusan sebagai berikut: semakin seseorang memiliki hubungan intim dengan mereka yang berbeda dari kelompok dan identitasnya, semakin dia

terbuka dan saling menghargai satu sama lain; semakin terbatas hubungan intim dengan mereka yang berbeda, semakin dia mudah terprovokasi untuk memusuhi, mengucilkan, bahkan mendiskriminasi mereka yang berada di luar kelompoknya. Rumusan ini, keintiman interaksi sosial ini bisa menjelaskan mereka yang mudah dan tidak mudah terprovokasi propaganda politik identitas, apapun ideologi dan ajaran teologi yang dia anut.

Kasus-kasus konflik sosial, baik pada skala besar maupun skala kecil, selalu dimulai oleh pemicu kecil. Meski pemicunya sangat kecil, namun hal tersebut diolah dan dipolitisir sehingga memantik emosi dan konflik yang lebih luas dan besar. Di sinilah kita bisa melihat bahwa interaksi sosial yang terbatas “membawa” pengaruh terhadap rentannya konflik yang kecil menjadi besar dan meluas.

E. Dua Pendekatan

Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi ketegangan sosial akibat kurangnya interaksi yang mengakibatkan mudah terprovokasi propaganda politik identitas?

1. Membuka Ruang Dialog

Menjawab pertanyaan ini, para sarjana telah mengusulkan dialog sebagai jalan keluar. Dialog di sini merujuk pada interaksi antara pemimpin satu kelompok dengan kelompok lainnya di masyarakat, khususnya mereka yang sudah dan sedang mengalami ketegangan, atau setidaknya memiliki perbedaan pandangan di masyarakat. Leonard Swidler dalam bukunya *Dialogue for Interreligious Understanding* (2014) berpendapat bahwa dialog yang ideal terdiri dari kepala (*head*), tangan (*hand*), hati (*heart*), dan yang Suci (*the Holy*). Unsur dialog pertama adalah kepala. Kepala yang dimaksud di sini adalah ide atau pikiran yang bertujuan untuk mencapai kebenaran. Dialog melalui kepala berarti interaksi dua orang atau lebih untuk mencari kebenaran yang diakui bersama.

Unsur kedua, tangan. Tangan mengilustrasikan uluran tangan untuk berjabatan. Jabat tangan pada akhirnya menggambarkan bahwa dialog harus berorientasi menghasilkan kebaikan bersama. Aspek ketiga, hati. Hati, bagi Swidler, mewakili perasaan. Melalui hati, kita bisa menakar mana aspek yang indah dan mana yang kurang enak dirasakan. Melalui hati, dialog diharapkan akan menghasilkan keindahan yang akan dinikmati bersama. Terakhir, yang Suci. Swidler menekankan bahwa dialog harus melibatkan spiritualitas, yang datang dari yang maha Suci. Dengan demikian, dialog pada akhirnya akan bermuara pada kebenaran Tuhan.¹³

Para sarjana mulai membaca kemungkinan dialog secara kritis dan mengajukan pandangan alternatif bagi transformasi konflik keagamaan. Salah satunya, Izak Lattu, Ph.D. Menurut Lattu, dialog adalah konsep ideal yang memiliki keterbatasan nyata untuk keluar dari ketegangan sosial, apalagi konflik di masyarakat. *Pertama*, dialog mensyaratkan elit dari masing-masing kelompok. Dialog pada kenyataannya tidak pernah bisa diikuti semua pihak, khususnya masyarakat bawah. Masyarakat bawah, khususnya mereka yang tidak berpendidikan, bukan saja tidak memiliki kemampuan tetapi juga ketidakmauan untuk terlibat dalam dialog. Mereka pada umumnya akan menyerahkan suaranya kepada elit komunitasnya. Menyerahkan suara kepada wakil mengandung risiko. Elit bagaimanapun memungkinkan tidak bebas kepentingan dalam menyalurkan aspirasi komunitasnya. Kemudian, menitipkan suara kepada wakil di ruang dialog, bukan tidak mungkin suara tersebut disalahgunakan demi kepentingan tertentu.

Kedua, dialog biasanya fokus mendiskusikan ide atau gagasan yang diperselisihkan. Mendiskusikan ide atau gagasan yang diperselisihkan kadangkala gagal menemukan akar masalah yang lebih dalam di balik ketegangan di antara kelompok. Meskipun pertengkaran membawa ide dan ajaran keagamaan tertentu, kedua pihak seringkali berseteru bukan pada tafsir keagamaan melainkan pada aspek lain, seperti ekonomi atau status sosial.

Ketiga, dialog juga tidak memberi jaminan keberlanjutan. Risiko ini maksudnya adalah bahwa apa yang telah dijadikan materi belum tentu akan bertahan lama dipegang para pihak. Mengapa? Karena masyarakat tidak terlibat terlalu dalam. Masyarakat hanya menerima hasil kesepakatan di antara para elit. Keputusan hasil dialog tidak datang dari apa yang menjadi perhatian dan kepentingan masyarakat. Apa yang disepakati elit dalam dialog karenanya bisa saja dilanggar oleh masyarakat, atau tidak menjadi pertimbangan ketika ketegangan kembali mengemuka karena provokasi politik identitas tidak pernah mati. Sebagaimana telah dibahas, politik identitas di era media sosial tidak ada matinya. Provokasi akan terus berkembang seiring dengan fasilitas yang terus ada yang disediakan teknologi, internet, dan media sosial. Dengan demikian, kita perlu memikirkan keberlanjutan dari upaya menjembatani hubungan-hubungan yang telah retak sebelumnya.

2. Kohesi Sosial

Atas keterbatasan dialog, lalu apa jalan keluarnya? Berdasarkan studi di Ambon, Izak Lattu menemukan bahwa ada mekanisme sosial yang bisa melengkapi dialog yang terbatas di atas, yakni inklusi sosial. Inklusi sosial di sini berarti situasi yang mana para pihak tidak hanya mendialogkan kesamaan dan perbedaan tafsir, melainkan juga menjalin hubungan, membangun kerjasama sosial, dan memelihara ikatan tersebut melalui beragam simbol di masyarakat. Inklusi sosial menilai dialog penting, tetapi tidak cukup. Setelah dialog digelar, kerjasama dalam berbagai bidang di masyarakat seperti memperbaiki sanitasi air bersama, mengelola sampah bersama, nonton bareng piala dunia bersama, termasuk bahu membahu membangun rumah ibadah lintas agama.

Tujuan utama kohesi sosial adalah memperkuat daya tahan masyarakat dari provokasi politik identitas yang merenggangkan hubungan dan memecah belah. Selain itu, inklusi sosial juga menjadi penawar bagi daerah yang sudah terlanjur terprovokasi oleh propaganda politik.

Inklusi sosial menyediakan ruang-ruang rekonsiliasi, rehabilitasi, dan transformasi konflik. Izak Lattu mengartikulasikan menjadi empat rumusan: Keterlibatan struktural, keterlibatan asosiasi, keterlibatan sehari-hari, dan keterlibatan simbolik.

a. Keterlibatan struktural

Keterlibatan struktural melihat peran pemerintah dalam menciptakan, memfasilitasi, dan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat satu sama lain lebih intim. Secara konstitusional, pemerintah mengemban tugas untuk melindungi, melayani, dan memfasilitasi masyarakat. Tugas ini tidak berhenti pada seorang individu, melainkan juga kepada sekelompok individu di masyarakat. Lebih jauh lagi, pemerintah diharapkan menjadi penengah dari berbagai persoalan di masyarakat. Oleh karenanya, keterlibatan struktural ini fokus pada peran dan inisiatif yang dilakukan pemerintah.

Siapa yang dimaksud pemerintah? Semua pihak, mulai dari pemerintah eksekutif tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Peran legislatif yang membantu dari sisi pengawasan juga dianggap bagian dari pemerintah. Lembaga penegak hukum, dalam hal ini kepolisian yang selama ini menjadi pelayan dan pelindung masyarakat adalah di antara corong terdepan dalam menciptakan ruang-ruang keterlibatan warga. Kepolisian juga memiliki beberapa divisi yang berkontribusi satu sama lain dan saling melengkapi dengan kontribusi peran lembaga pemerintah lainnya. Misalnya, peran Binmas (pembinaan masyarakat), intel, dan reserse dan kriminal tentu saja memiliki peran dan kontribusi masing-masing.

Kementerian agama adalah di antara lembaga negara yang juga memiliki peran baik di tingkat elit maupun di masyarakat bawah. Pada level elit, Kementerian Agama fokus pada penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, dan pengelolaan dana kegiatan.

Secara struktural, Kementerian Agama yang langsung bekerja dengan masyarakat juga memiliki peran sentral, dalam hal ini penyuluh agama Islam. Pada setiap kecamatan paling tidak ada seorang penyuluh yang berstatus Aparatur Sipil negara (ASN), dan minimal 6 lainnya yang non-ASN. Mereka adalah di antara aparat pemerintah yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan keterlibatan-keterlibatan sosial antar kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Sebagaimana dipaparkan di awal, identitas di masyarakat itu beragam, cari, dan tidak tunggal. Hal ini mengisyaratkan penyuluh agama perlu mengelola keragaman tersebut secara kreatif sebagai perwakilan negara yang memungkinkan keterlibatan sosial.

Kreativitas adalah kunci bagi peran aktif pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat terlibat satu sama lain lebih intim dalam berbagai kegiatan inklusi sosial. Beberapa alternatif berikut bisa dipertimbangkan. *Pertama*, penyuluhan agama melalui pengelolaan sampah bersama. Ibarat kata, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Sampah yang menjadi masalah serius di masyarakat dikelola dan pada saat yang sama hubungan antar masyarakat atau interaksi sosial masyarakat semakin intim. *Kedua*, perhatikan trend kegiatan positif yang disukai anak-anak muda. Misalnya, kegiatan rutin latihan olah raga bersama bisa menjadi modus untuk saling mengakrabkan beragam komunitas di wilayah tersebut. *Ketiga*, libatkan lebih banyak perempuan, muda maupun dewasa. Mereka pada umumnya mempunyai daya kreativitas lebih dalam mengelola kegiatan sosial untuk mempersatukan.

Selain kreativitas, keberhasilan peran pemerintah dalam menciptakan masyarakat saling terlibat juga sangat tergantung pada kerjasama antar lembaga pemerintah. Seringkali, pemerintah dari berbagai lembaga melakukan kegiatan serupa, target penerima manfaatnya sama, namun beda waktu. Selain tidak efektif dan efisien, nilai tambahnya rendah dibanding bila

kerjasama untuk membuat kegiatan kreatif. Di banyak daerah kerjasama sudah dilakukan, dan ini harus direplikasi oleh seluruh lapisan pemerintahan agar terbangun keterliatan sosial yang lebih luas.

Terakhir, peran pemerintah akan signifikan jika melibatkan warga bukan saja sebagai peserta tetapi juga dalam merumuskan rencana kegiatan bersama. Pelibatan warga sejak dalam perencanaan memungkinkan kerjasama dan suasana saling percaya tumbuh. Selain hasilnya akan maksimal, proses yang saling berkontribusi memungkinkan keberlanjutan berkegiatan yang bisa saja inisiatif datang dari kedua pihak secara bergantian. Kadang inisiatif datang dari masyarakat, kadang dari pemerintah, dan kadang muncul dalam obrolan bersama.

b. Keterlibatan asosiasi

Keterlibatan asosiasi dibagi menjadi dua: asosiasi formal dan non-formal. Asosiasi yang dimaksud adalah ragam organisasi atau komunitas yang saling beririsan satu sama lain. Misalnya, seorang tokoh agama di satu daerah misalnya adalah juga biasanya tokoh partai politik, tokoh olah raga, dan tokoh hobi memancing. Keterlibatan tokoh tersebut dalam asosiasi-asosiasi yang beragam ini, baik formal dan non-formal, perlu dimanfaatkan untuk memperkuat ikatan sosial masyarakat. bayangkan, satu orang memiliki empat atau lima asosiasi, tidakkah sumber daya yang melimpahjika kita identifikasi semua tokoh yang ada di masyarakat. Pada asosiasi formal, keterlibatan sosial menyesuaikan dengan rencana kerja dan rencana kegiatan yang sudah dirumuskan bersama. Pada asosiasi formal ini, prinsip berupa kreativitas, kerjasama, pelibatan anak muda, dan perempuan sebaiknya niscaya menjadi pertimbangan untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Di antara asosiasi formal yang ada di Indonesia, dalam bidang agama, misalnya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB adalah lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) tahun 2006. Di setiap provinsi, kabupaten, dan kota sudah terbentuk FKUB. FKUB di bawah pimpinan wakil gubernur, wakil bupati atau wakil wali kota. Adapun ketua harian terdiri dari tokoh agama setempat yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan daerah setempat dan ditembuskan ke pemerintah pusat. Lembaga ini, dilihat dari profil tersebut, menjanjikan sebagai bagian dari asosiasi formal yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat dari sisi agama. Lembaga ini memiliki mandat untuk memfasilitasi dialog yang bisa disatukan dengan kegiatan lain yang tujuannya sama: memperkuat ketahanan sosial dari provokasi politik identitas.

Asosiasi formal lain yang layak dipikirkan adalah asosiasi penyuluh agama. Penyuluh agama adalah aparat pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Para penyuluh perlu menguatkan satu sama lain melalui kegiatan saling belajar berdasarkan pengalaman masing-masing melalui asosiasi formal berupa paguyuban. Selain itu, asosiasi penyuluh juga bisa saling membantu saran satu sama lain jika satu daerah menghadapi masalah pelik. Asosiasi ini juga pada gilirannya bisa menjadi sarana untuk mengembangkan keterlibatan asosiasi yang bisa memperkuat ketahanan sosial dari provokasi pecah belah di masyarakat.

Sementara itu, kita juga perlu melihat asosiasi non-formal sebagai potensi untuk mempersatukan masyarakat satu sama lain. Asosiasi non-formal pada umumnya dibentuk atas dasar kesamaan hobi. Asosiasi ini misalnya asosiasi pecinta burung, asosiasi pengendara Vespa, asosiasi pecinta layang-layang, dan seterusnya. Asosiasi non-formal semacam ini juga adalah kesempatan yang tidak

boleh dilewatkan untuk memperkuat daya tahan masyarakat dari provokasi. Asosiasi non-formal bisa menjadi sarana filter berita-berita palsu sambil mempersiapkan turnamen layang-layang nasional, misalnya. Atau asosiasi pecinta Vespa kampanye binadamai bagi anak muda yang selama ini menjadi sorotan karena perilaku gang motor sambil berkeliling kota dengan Vespa bersama-sama. Singkat kata, asosiasi formal dan non-formal bisa menjadi sarana untuk memperkuat daya tahan masyarakat dari ancaman dan provokasi politik identitas.

c. Keterlibatan sehari-hari

Keterlibatan sehari-hari adalah perjumpaan-perjumpaan masyarakat di berbagai arena dalam kehidupan sehari-hari. Ruang perjumpaan tersebut seperti pasar, sawah, kebun, pabrik, angkutan umum, laut, dan lainnya. perjumpaan sehari-hari ini juga dipertimbangkan sebagai satu di antara arena yang dimanfaatkan untuk mempererat hubungan masyarakat, memperkuat daya tahan masyarakat, dan menyaring segala macam propaganda yang masuk ke masyarakat dari pihak yang ingin memecah belah demi kepentingan politik.

Obrolan di warung kopi seperti di Aceh dan Lampung adalah di antara keterlibatan sehari-hari yang perlu dimasuki sebagai ruang perjumpaan penting. Di sana lah berbagai hal dibicarakan, mulai dari perkara gosip artis sampai permasalahan politik yang lebih serius, baik perkara di komunitas bahkan sampai perkara di luar negeri. Singkatnya keterlibatan sehari-hari tidak bisa diabaikan sebagai kesempatan baik untuk mempererat hubungan sosial.

d. Keterlibatan simbolik

Keterlibatan simbolik lebih banyak berkaitan dengan budaya dan tradisi setempat. Indonesia adalah negara di mana budaya dan tradisi masih melekat kuat di masyarakat. Budaya di sini

kadangkala beririsan dengan agama. Misalnya, di pesantren seringkali kita dengar seni musik rebana yang mengiringi lagu-lagu keagamaan, termasuk *sholawat*. Antara budaya dan kegiatan yang dibenarkan agama saling beririsan di sini. Tak hanya aspek seni, tetapi ritual tradisi yang sudah disesuaikan dengan agama juga masih banyak terpelihara di masyarakat. Misalnya, di Jawa Tengah dan Yogyakarta masih dikenal tradisi *Rasulan* atau bersih desa. Bersih desa berarti bersih dalam arti fisik dan spiritual. Desa bersih dari sampah di satu sisi. Desa juga bersih dari gangguan spiritual yang selama ini mengganggu dan menjadi biang ketegangan di masyarakat. Kegiatan bersih desa dipimpin tokoh agama yang menggunakan ritual yang diperkenankan oleh agama yang bersangkutan.

Ritual semacam itu selalu ada di setiap daerah. Kegiatan simbolik ini tidak bisa dianggap remeh dalam rangka memperkuat hubungan masyarakat dan mempertebal kekebalan masyarakat untuk menghalau provokasi politik menggunakan identitas. Ritual ini selain mengandung unsur spiritual, tetapi juga peserta sadar bahwa mereka bersaudara dan karenanya mereka harus saling menjaga. Ketahanan sosial perlu direkatkan oleh ritual semacam *Rasulan*, yang mungkin di daerah lain istilahnya berbeda.

F. Gerakan Dakwah Membangun Kohesi Sosial

Sebagaimana telah dipaparkan di bagian pendahuluan, politik identitas yang mengarah pada konflik sosial pada akhirnya menjadi tanggungjawab semua pihak, termasuk tokoh agama. Berdasarkan pemaparan di atas, gerakan dakwah model apa yang berorientasi untuk merekatkan masyarakat yang berpotensi dan sudah terpecah akibat politik identitas. Tulisan ini mengajukan beberapa usulan.

Pertama, gerakan dakwah pada dasarnya berorientasi pada kebaikan. Di negara yang beragam seperti Indonesia, kebaikan dimengerti

sebagai ajakan untuk membangun dan mempererat kerjasama antar umat beragama di bawah bingkai *bhineka tunggal ika*. Para da'i tentu paham bahwa kerjasama yang dimaksud bukan pada tataran teologi, melainkan sosial kemasyarakatan. Kerjasama mencerminkan suasana saling percaya satu sama lain. Setiap agama, termasuk Islam, memiliki prinsip emas: Jangan lakukan apa yang kamu tidak mau orang lain lakukan kepadamu. Lebih dari itu, lakukan apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu. Pada prinsip inilah kerjasama dengan mereka yang berbeda agama, keyakinan, politik, etnis, suku, bahasa, dan budaya dimungkinkan.

Kedua, para da'i mendorong perjumpaan dengan mereka yang berbeda secara politik, alih-alih menjauhkannya. Perbedaan adalah keniscayaan, termasuk dalam politik. Islam malah memerintahkan untuk saling mengenal satu sama lain. Ada banyak cara untuk berkenalan dengan mereka yang berbeda. Perkenalan bisa melalui bahan bacaan, perkenalan melalui audio visual, atau perkenalan melalui perjumpaan langsung. Lagi-lagi, penulis perlu menekankan bahwa perkenalan bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan pengetahuan mengenai orang lain yang berlainan pilihan politik, keyakinan, etnis, budaya, dan adat istiadat. Tujuan lain, agar kita mengetahui batas-batas antar kita dengan mereka yang berbeda. Pemahaman mengenai batas ini penting agar kita tahu sampai di mana kita bisa masuk ke "rumah" mereka yang berbeda, sebagaimana kita ingin agar orang lain paham batas-batas kita. Batas tersebut, bagi penulis, adalah dimensi keyakinan dan ritual keagamaan. Membangun kepercayaan yang memiliki bekal pengetahuan mengenai adat, budaya, agama, dan keyakinan orang lain lebih mudah dicapai daripada mereka yang pengetahuannya serba terbatas. Oleh karenanya, para da'i diharapkan memperbanyak pengetahuan yang mempertemukan.

Ketiga, para da'i juga bisa mempertemukan mereka yang berbeda politik dalam beragam kegiatan sosial. Perjumpaan yang dimaksud bukan sekadar berjumpa formalitas, melainkan berjumpa untuk kerjasama.

Masalah sosial seperti dampak minuman keras, dampak narkoba, dampak gizi buruk, dan masalah sosial lainnya tidak mengenal agama atau keyakinan. Semua penganut aliran politik bisa tertulari HIV AIDS jika masalah narkoba, khususnya jarum suntik, tidak diatasi. Sayangnya, persoalan tersebut tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Butuh kerjasama antar pihak masyarakat, apapun warna politik dan keyakinannya. Untuk itu, sudah seyogyanya kerjasama menjadi salah satu materi dakwah pada da'i agar persoalan sosial yang berat bisa diatasi bersama-sama. Inilah yang oleh Izak Lattu disebut sebagai *associational engagement* atau keterlibatan asosiasi.

Terakhir, para da'i perlu memanfaatkan kegiatan budaya dan adat yang melibatkan banyak pihak sebagai sarana perekat masyarakat di atas perbedaan. Sebagaimana telah dipaparkan, *Rasulan*, di Jawa Tengah, adalah salah satu contohnya. Barangkali di tempat lain, hidangan bubur Ashura bisa menjadi sarana perjumpaan beragam tradisi Islam untuk memperingati peralihan tahun baru Islam, yang bagi sebagian mazhab, lebih dari itu pemaknaan di baliknya. Terlepas dari makna yang pasti mengandung ragam tafsir, kegiatan budaya di antara sarana yang bisa mempertemukan, khususnya pada tataran simbolik bahwa kita hidup dalam keragaman.

G. Penutup

Dua dekade demokrasi Indonesia berwajah ganda: di satu sisi kita sambut dengan suka cita, dan di sisi lain kita mencatat sejumlah hal yang harus kita perbaiki. Beberapa catatan tersebut di antaranya demokrasi mengakibatkan politik identitas yang memecah belah masyarakat. Jika dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin di masa mendatang kita malah menghadapi konflik sosial yang lebih luas. Kenapa? Masyarakat kita belakangan lebih sensitif menghadapi provokasi ketimbang sebelumnya. Bukan karena ideologi keagamaan atau rasa nasionalisme yang berlebihan, melainkan interaksi sosial yang semakin jarang atau

terhalang tembok media sosial. Media sosial seperti mempertemukan, padahal sejatinya memecah belah para penggunanya juga.

Agar daya tahan masyarakat lebih kuat, kita butuh dialog. Dialog yang mengedepankan suara hati sehingga orientasinya adalah kebaikan bersama. Namun, dialog tersebut perlu diperkuat lagi dengan kegiatan yang bernuansa inklusi sosial. empat model keterlibatan yang bisa dimanfaatkan di masyarakat. Peran pemerintah dalam memfasilitasi keterlibatan sosial di masyarakat. pemerintah bukan saja dituntut kreatif, juga dituntut kerjasama antar lembaga pemerintah, dan dengan lembaga non-pemerintah.

Kemudian, keterlibatan asosiasi, baik formal dan non formal, perlu dimanfaatkan untuk menjaga ketahanan sosial dari provokasi. Selanjutnya, keterlibatan sehari-hari di pasar, kebun, kolam memancing ikan, laut, dan tempat lainnya yang memungkinkan mereka saling bicara dan saling berbagai pengetahuan dan keresahan. Terakhir, keterlibatan masyarakat melalui kegiatan budaya simbolik dan melalui beragam ritual.

Semua peran tersebut juga menjadi domain para da'i. Dengan kapasitas dan kedudukannya di masyarakat, para da'i dapat menggerakkan dakwah sebagai sistem yang dapat memperkuat hubungan sosial sehingga mampu menjadi benteng dari berbagai potensi negatif yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pilihan politik.

Daftar Pustaka

- Aritonang, Deytri R., "Ternyata Tingkat Partisipasi dalam Pilpres Menurun Dibandingkan Pileg (23/04/2014)", Kompas.com. <https://bit.ly/2L9dz0A>. (Diakses pada 19 Juli 2018).
- Badan Pusat Statistik, "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut. Indonesia", *bps.go.id* <https://bit.ly/2L7ZRej>, diakses pada 19 Juli 2018.
- Calhoun, C. J., "Social theory and the politics of identity", 1994.
- George, Cherian, *Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy*. Cambridge: The MIT Press, 2016.
- Held, D., *Models of democracy*, Polity, 2006.
- Kurnia, Tommy, "5 Negara dengan Jumlah Pengguna Media Sosial Terbanyak, Indonesia Berapa?, 24 April 2018", *Liputan6.com*, <https://bit.ly/2NuoK0H>, diakses pada 18 Juli 2018.
- Lattu, I. Y. M., "Orality and interreligious relationships: The role of collective memory in Christian-Muslim engagements in Maluku, Indonesia", *Doctoral dissertation*, Graduate Theological Union, T. Th.
- Leftwich, A. *What is Politics: The Activity and Its Study*, T. tp: John Wiley & Sons, 2015.
- Lestari, Sri, "Pertarungan Pilpres Sengit di Media Sosial", *bbc.com*, 05/07/2014, <https://bbc.in/2mqMpTX>, (diakses pada 19 Juli 2018).
- Nugroho, Bagus P. "Di Depan Para Gubernur, Jokowi Sebutkan Jumlah Kepala Daerah Korupsi", *Detik.com*, 11/12/2017). <https://bit.ly/2zN0AfL>. (diakses pada 18 Juli 2018).
- Rahman, F., *Islam*, Chicago: Chicago University, 1979.
- Schumpeter, Joseph, *Capitalism, Socialism and Democracy*, London and

New York: Routledge, 1942.

Stepan, A., Linz, J. J., & Yadav, Y., *Crafting State-Nations: India and other Multinational Democracies*, JHU Press, 2011.

Swidler, L., *A Universal Declaration of a Global Ethic. In Dialogue for Interreligious Understanding*, New York: Palgrave Macmillan, 2014.

Endnotes

1. Lattu, I. Y. M., "Orality and interreligious relationships: The role of collective memory in Christian-Muslim engagements in Maluku, Indonesia" *Doctoral dissertation*, Graduate Theological Union, 2015.
2. Held, D., *Models of democracy*, T. Tp: Polity, 2006, h. 77.
3. Schumpeter, Joseph, *Capitalism, Socialism and Democracy*, London and New York: Routledge, . 1942, h. 269.
4. Stepan, A., Linz, J. J., & Yadav, Y., *Crafting State-Nations: India and other Multinational Democracies*, T.tp., JHU Press, 2011, T. th.
5. Aritonang, Deytri R., "Ternyata Tingkat Partisipasi dalam Pilpres Menurun Dibandingkan Pileg", 23/04/2014, *Kompas.com*. <https://bit.ly/2L9dz0A>. (Diakses pada 19 Juli 2018)
6. Leftwich, A., *What is politics: The Activity and its study*, John Wiley & Sons, 2015, h. 7.
7. Calhoun, C. J., "Social theory and the politics of identity", T. Tp; T. tp., 1994, h.12.
8. Ibid. h. 13.
9. Kurnia, Tommy, "5 Negara dengan Jumlah Pengguna Media Sosial Terbanyak, Indonesia Berapa?", *Liputan6.com*, 24 April 2018, <https://bit.ly/2NuoK0H>. (diakses pada 18 Juli 2018).
10. George, Cherian, *Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy*, Cambridge: The MIT Press, 2016.
11. Ibid.
12. Rahman, F., *Islam*, Chicago: Chicago University, 1979.
13. Swidler, L.X., *A Universal Declaration of a Global Ethic. In Dialogue for Interreligious Understanding*, New York: Palgrave Macmillan, 1979, h. 169-175.